



**RENCANA
STRATEGIS
DINAS
PERIKANAN
KABUPATEN
SIDOARJO**

**TAHUN
2021
|
2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perikanan. Penetapan program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sidoarjo 2009 - 2029.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh. Untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Renstra baik pada periode ini dan periode berikutnya.

Sidoarjo, September 2021

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM
NIP. 19661228 199208 1 002



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	li
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1 - 1
1.1 Latar Belakang	1 - 1
1.2 Landasan Hukum	1 - 5
1.3 Maksud dan Tujuan	1 - 8
1.4 Sistematika Penulisan	1 - 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II - 11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II - 38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	III - 10
3.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	III - 14
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 17



		Hal
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	III - 25
BAB	IV TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV - 1
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV - 2
BAB	V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
BAB	VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	VI - 1
BAB	VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB	VIII PENUTUP	VIII - 1



DAFTAR TABEL

		Hal
T. 2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jabatan Per 31 Desember 2020	II - 12
T. 2.2	Usia Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Per 31 Desember 2020	II - 13
T. 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2020	II - 13
T. 2.4	Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Per 31 Desember 2020	II - 14
T. 2.5	Inventaris Laboratorium Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Per 31 Desember 2020	II - 15
T. 2.6	Daftar Pusat Pendaratan Ikan Per 31 Desember 2020	II - 18
T. 2.7	Jumlah Petani Tambak dan Pandega (PTP) Per 31 Desember 2020	II - 19
T. 2.8	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020	II - 22
T. 2.9	Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020	II - 24
T. 2.10	Target dan Realisasi Peningkatan Pendapatan Nelayan Tahun 2016-2020	II - 27
T. 2.11	Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2016-2020	II - 28
T. 2.12	Produksi Perikanan Umum Daratan Tahun 2016-2020	II - 29
T. 2.13	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Tahun 2016-2020	II - 30
T. 2.14	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Tahun 2016-2020	II - 31
T. 2.15	Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2016-2020	II - 34
T. 2.16	Target dan Realisasi Angka Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020	II - 35
T. 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020	II - 37
T. 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2024	III - 16
T. 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo	IV - 4



T. 5.1	Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo	V - 4
T. 6.1	Tujuan, Sasaran , Program, Indikator Kinerja, Dan Kerangka Pendanaan	VI - 3
T. 7.1	Indikator Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 3



DAFTAR GAMBAR

	Hal
G. 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra	I - 5
G. 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo	II - 2
G. 2.2 Persentase Kontribusi Sektor PKP dan Subsektor Perikanan Pada PDRB	II - 25



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.



Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantiknnya Kepala Daerah sampai dengan berakhirnya masa jabatan; dan
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang (RKPD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan
- b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan (kode 3.25), Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu tersebut. Penyusunan Renstra tersebut mengacu kepada RPJMD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi



Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 disusun untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 dilakukan melalui tiga tahapan penting yang harus dilakukan oleh setiap stakeholders penyusunan renstra. Pertama, penyusunan dokumen rancangan renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 -2026 sebagai rancangan awal untuk bahan dasar yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Kedua, penyusunan rancangan akhir dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk memberikan kontribusi terhadap renstra. Ketiga, penetapan renstra sebagai dokumen resmi melalui pertauran Kepala Daerah

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, agar dapat tercipta sinergitas dan keselarasan program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah. Keterkaitan Renstra ini dengan RPJMD adalah dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan dalam rangka mengoptimalkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya subsektor perikanan. Peran dan fungsi RPJMD sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi acuan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi seluruh stakeholder termasuk swasta dan masyarakat.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pencapaian Misi ke - 2 dari RPJMD yaitu “Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan”. Salah satu Tujuan dari Misi tersebut adalah



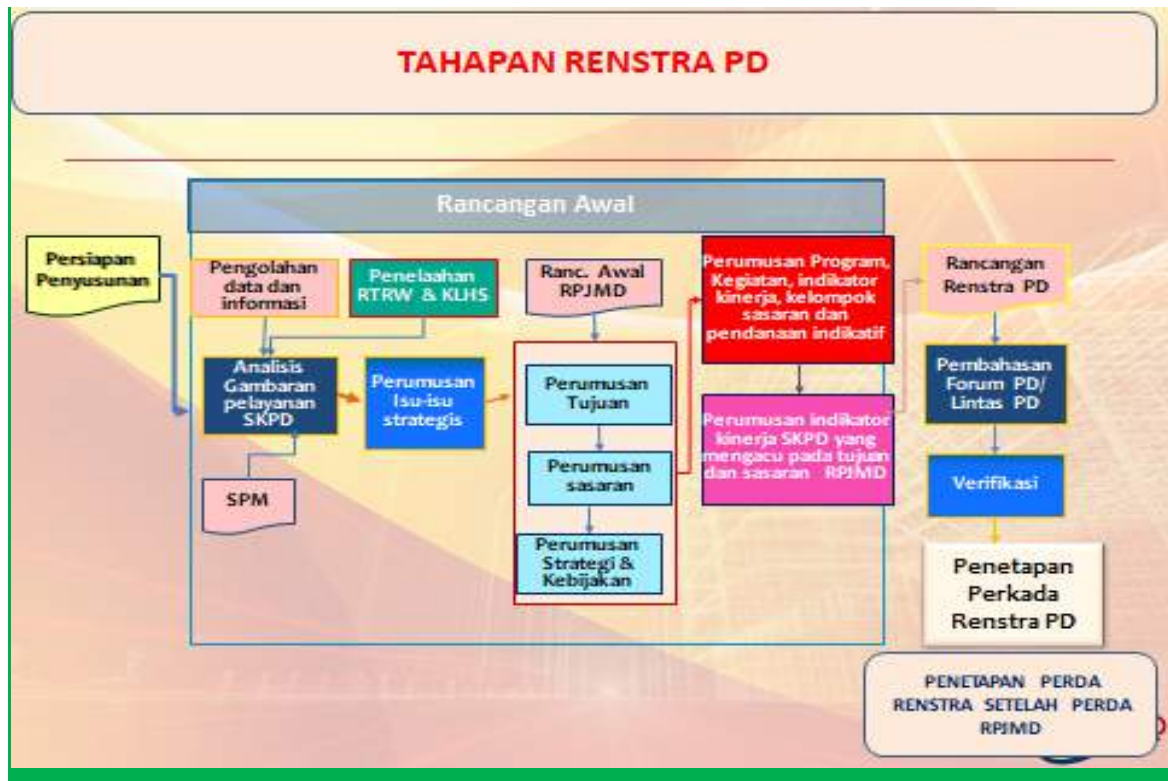
“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan”, dan sasarannya adalah “Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan”, yang pencapaiannya diukur dengan indikator berupa Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.

Selain itu penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo juga mengacu pada arah kebijakan Nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sehingga diharapkan terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan maupun pelaksanaannya. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya selama periode tahun 2021 – 2026 dapat dievaluasi.

Dokumen Rencana Strategis ini Rencan merupakan proses yang berkelanjutan akan menjadi acuan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja (Renja) Dinas Perikanan di setiap tahun selama periode 2021 - 2026. Oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.



Gambar 1.1



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara R.I. Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan Dan Perikanan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di bidang perikanan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2026.



2. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Pelayanan.

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional; serta Kinerja Pelayanan yang menjelaskan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya termasuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis.

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Jawa Timur, yang meliputi



Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategi.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran.

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. beserta indikator kinerjanya.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan.

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI



Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan, yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

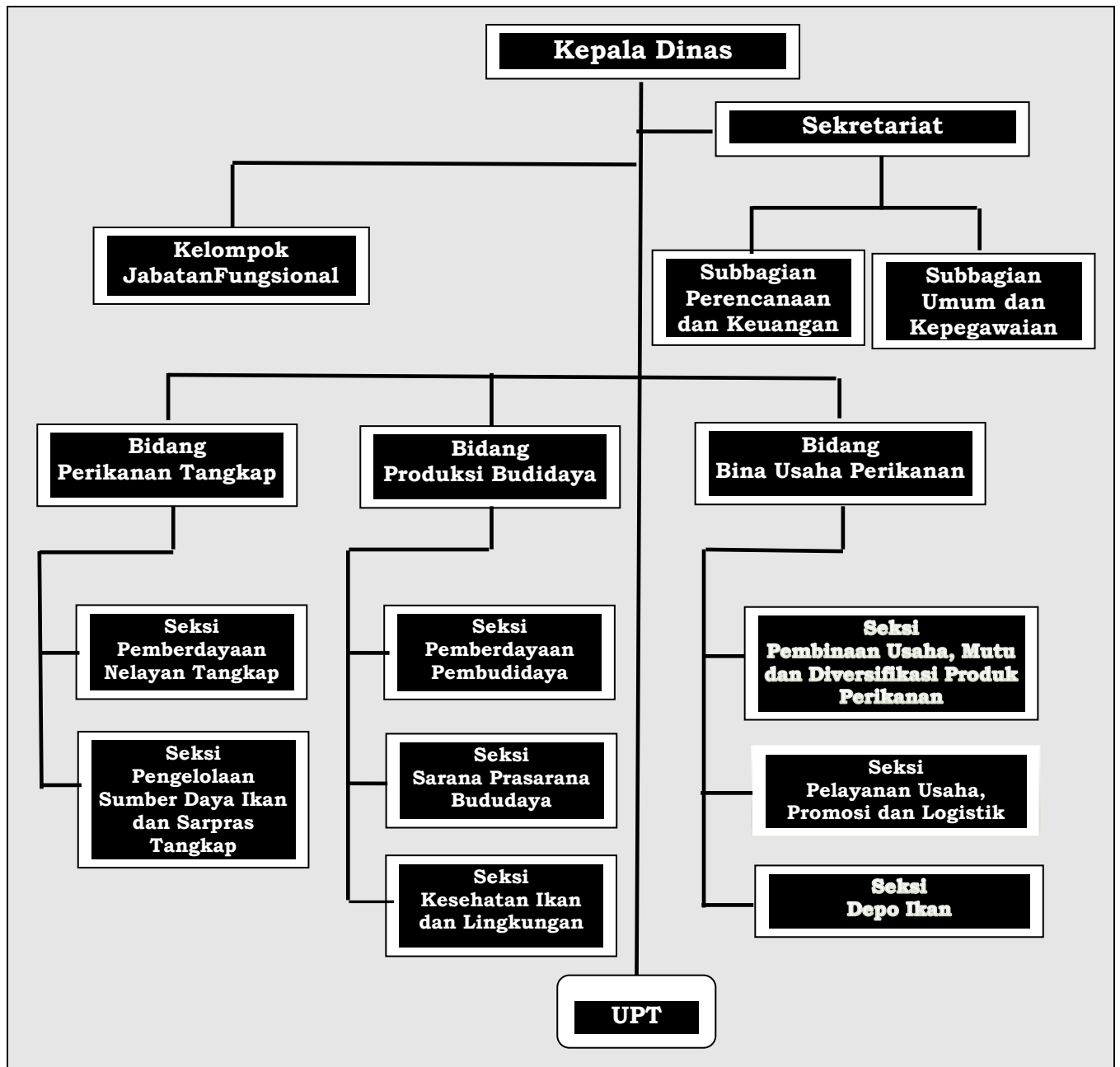
Dalam menjalankan tugas, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2018 tersebut ditetapkan susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas Perikanan**, mempunyai tugas memimpin, koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi:



- 1) Perencanaan program bidang Kelautan dan Perikanan serta kesekretariatan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Kepala Dinas Perikanan berwenang menandatangani izin bidang kelautan dan perikanan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- 2) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

(1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang;
- c. Menerima dan mengoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat
- d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



(2) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. Menyusun laporan dinas;
- c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. Melaksanakan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. **Bidang Perikanan Tangkap**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perikanan tangkap;
- 2) Pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap, meliputi pemberdayaan nelayan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan dan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

(1) **Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap**, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Nelayan tangkap;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan nelayan tangkap, meliputi :
 - (a) Pelatihan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana penangkapan ikan, penanganan ikan diatas kapal dan keselamatan Nelayan di laut;
 - (b) Sosialisasi undang-undang dan kebijakan pemerintah di bidang perikanan tangkap;



- (c) Melaksanakan kebijakan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - (d) Melaksanakan bantuan/hibah kepada nelayan dan masyarakat pesisir untuk peningkatan pendapatan;
 - (e) Pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - (f) Pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
 - (g) Penguatan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir;
 - (h) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
 - (i) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan petambak garam;
 - (j) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)
- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan nelayan tangkap;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) **Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Sarana Prasarana Tangkap**, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknispemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana perikanan tangkap;
 - c. Menyiapkan bahan pemulihan sumber daya ikan dan daya dukung produktifitas sumber daya perairan;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana prasarana tangkap meliputi :
 - (a) Menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);



- (b) Menyusun dan menganalisa rencana pembangunan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - (c) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - (d) Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana perikanan tangkap kelompok nelayan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan penangkapan ikan di perairan;
 - f. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem dan lingkungan pesisir;
 - g. Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan proses penyidikan dan pelanggaran kasus Perikanan dan Kelautan;
 - h. Menyiapkan bahan Laporan pelaksanaan teknis pengelolaan sumber daya ikan dan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - i. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
4. **Bidang Produksi Budidaya**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang produksi budidaya. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Produksi Budidaya mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan kebijakan teknis produksi budidaya;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan produksi budidaya, meliputi pemberdayaan pembudidaya dan sarana prasarana budidaya dan kesehatan ikan serta lingkungannya;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Bidang Produksi Budidaya terdiri dari:

- (1) **Seksi Pemberdayaan Pembudidaya**, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan pembudidaya;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya, meliputi :
 - (a) Pelatihan dan pembinaan budidaya air payau, budidaya air tawar;
 - (b) Pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau dan budidaya air tawar;
 - (c) Identifikasi dan verifikasi usaha perikanan budidaya serta dokumen Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya;
 - (d) Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya;
 - (e) Identifikasi dan memfasiliasi kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan;
 - (f) Fasilitasi pengadaan BBM untuk pembudidaya ikan air payau, air tambak
 - (g) Identifikasi dan memfasilitasi kebutuhan pupuk dan pakan ikan untuk budidaya perikanan;
 - (h) Fasilitasi pengajuan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
 - (i) Pengawasan, pengamatan dan menganalisa mutu benih;
 - (j) Identifikasi pembudidaya air payau dan air tawar;
 - (k) Evaluasi dan penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) air payau dan air tawar;
 - (l) Fasilitasi pengadaan BBM untuk pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
 - (m) Hibah untuk pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
 - (n) Melaksanakan operasional tambak dinas dan BBI;
 - (o) Pendampingan pada pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya;



d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) **Seksi Sarana Prasarana Budidaya**, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana budidaya;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sarana prasarana budidaya, meliputi:
 - (a) Identifikasi, inventarisasi prasarana budidaya;
 - (b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana budidaya;
 - (c) Pengelolaan sarana tambak dinas dan Balai Benih Ikan (BBI);
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sarana prasarana budidaya;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

(3) **Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya**, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan meliputi :
 - (a) Sosialisasi obat ikan kimia, bahan biologi dan residu;
 - (b) Pengawasan peredaran obat ikan ke toko obat dan pembudidaya;
 - (c) Pengambilan sampel air di lahan budidaya dan perairan umum untuk pengujian kualitas air dan mikrobiologi ke laboratorium level II;
 - (d) Pengambilan sampel ikan untuk uji residu dan mikrobiologi ke laboratorium level II;
 - (e) Monitoring di lapangan tentang kualitas air dan penyakit;
 - (f) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya air serta melakukan pemulihan



- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
5. **Bidang Bina Usaha Perikanan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Bina Usaha Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengolahan, Kesehatan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan kebijakan teknis bina usaha perikanan;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan meliputi pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk , pelayanan usaha , promosi dan logistic serta depo ikan;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang bina usaha perikanan terdiri dari :

- 1) **Seksi Pembinaan Usaha, Mutu dan Diversifikasi Produk**, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk, meliputi :
 - (a) Melaksanakan identifikasi pelaku usaha perikanan skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - (b) Melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan skala usaha mikro dan kecil;
 - (c) Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan produksi perikanan;
 - (d) Melaksanakan diversifikasi teknologi hasil perikanan;;
 - (e) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk hasil perikanan;



- (f) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;
 - (g) Melaksanakan identifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha perikanan;
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) **Seksi Pelayanan Usaha, Promosi dan Logistik**, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik.
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik, meliputi :
 - (a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan usaha;
 - (b) Menyiapkan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); dan menerbitkan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI);
 - (c) Melaksanakan pendataan dibidang pelayanan usaha perikanan;
 - (d) Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan;
 - (e) Melaksanakan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
 - (f) Melaksanakan pendataan distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi dan logistik;
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik;
 - d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- 3) **Seksi Depo Ikan**, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Depolkan;
 - b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Depo Ikan;
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Depo Ikan;



- d. Pengelolaan sarana dan prasarana Depo Ikan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
6. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang bersifat teknis operational dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten yang ditetapkan berlandaskan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo telah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan.

2.2 SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perikatan Kerja (PPPK) atau Non – PNS merupakan unsur abdi negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang cukup dominan dalam





pelaksanaan pembangunan/pemerintahan. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan sumber daya baik berupa dana maupun sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo per tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 64 personil, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 43 orang (yaitu pejabat struktural sebanyak 15 orang dan staf/fungsional sebanyak 27 orang) , serta PPPK 21 orang (yaitu tenaga honorer sebanyak 1 orang dan tenaga harian lepas atau pegawai tidak tetap sebanyak 20 orang). Berdasarkan pangkat/golongan, dan usianya, jumlah dan komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo per tanggal 31 Desember 2020, terinci sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jabatan
Per 31 Desember 2020

No	Gol/ Ruang	Jabatan						Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staff	Non PNS	
1	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
2	IV/b	-	1	-	-	-	-	1
3	IV/a	-	3	-	-	-	-	3
4	III/d	-	-	10	-	-	-	10
5	III/c	-	-	-	-	1	-	1
6	III/b	-	-	-	-	10	-	10
7	III/a	-	-	-	-	1	-	1
8	II/d	-	-	-	-	5	-	5
9	II/c	-	-	-	-	4	-	4
10	II/b	-	-	-	-	3	-	3
11	II/a	-	-	-	-	3	-	3
12	I/d	-	-	-	-	-	-	-
13	I/c	-	-	-	-	1	-	1
14	I/b	-	-	-	-	1	-	1
15	I/a	-	-	-	-	-	-	-
12	NON PNS	-	-	-	-	-	20	20
JUMLAH		1	4	10		29	20	64

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo



Tabel 2.2
Usia Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Per 31 Desember 2020

Umur	Golongan/Ruang					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
< 35 Th	-	15	-	-	7	22
35 Th – 52 Th	2	5	15	-	10	32
.> 52 Th	3	2	-	2	3	10
Total	5	22	15	2	20	64

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang studinya, ASN/pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo per tanggal 31 Desember 2020 terinci sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2020

No	Jurusan	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1/D4	S2	S3	
1	Administrasi Negara					1	3		4
2	Magister Management						4		4
3	Magister Agribisnis						1		1
4	Teknologi Kelautan						1		1
5	Peternakan					1			1
6	Pertanian					2			2
7	Teknik Lingkungan					1			1
8	Administrasi Pendidikan					1			1
9	Kelautan					1			1
10	Perikanan					4			4
11	Budidaya Perikanan					1			1
12	Non Jurusan	2	4	11	5				22
	TOTAL	2	4	11	5	12	9		43

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo



Dari data pegawai tersebut di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang bertugas pada Dinas Perikanan Sidoarjo sebagian besar masih dalam kategori usia produktif (s.d 52 tahun) yaitu sebanyak 84,37 %. Secara kualitas sumber daya manusia yang ada selain memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yakni S 1 dan S 2, juga bidang studi (jurusan pendidikan) yang ditempuh linier dengan pelaksanaan tupoksi, yakni perikanan, kelautan, budidaya perikanan dan lingkungan. Jumlah dan kompetensi pegawai tersebut di atas cukup memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan dan penyelesaian tugas sehari-hari dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam jumlah yang cukup guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi, sehingga tugas-tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki/dikuasai Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
Per 31 Desember 2020

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi
A	SARANA			
1	Posikandu	unit	1	Baik
2	Bangunan Kantor	unit	1	Baik
3	Ruang Pertemuan	unit	2	Baik
4	Bangunan Depo	unit	1	Baik
5	Pusat Pendaratan Ikan (PPI) & Dermaga	unit	9	Baik
6	Pasar Olahan Ikan dan Ikan Hias	unit	1	Baik
7	Outlet Olahan	unit	2	Baik
8	Balai Benih Ikan (BBI)	unit	1	Baik
9	Cold Storage	unit	2	Baik



No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi
10	Rumah Kemasan	unit	1	Baik
11	Tambak Dinas	Ha	18,5	Baik
12	Kolam Pancing	Lokasi	3	Baik
13	Alat Laboratorium	jenis	52	Baik
14	Bronjong	unit	34	Baik
15	Jembatan Produksi	unit	12	Baik
16	Plengseng	unit	24	Baik
17	Jalan Produksi	unit	27	Baik
B	PRASARANA			
1	Speedboat	unit	2	Baik
2	Perahu Kayu	unit	1	Baik
3	Mobil Dinas	unit	5	Baik
4	Sepeda Motor Dinas	unit	12	Baik

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Sedangkan rincian inventarisasi sarana prasarana laboratorium ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 2.5
Inventaris Laboratorium Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Per 31 – 12 – 2020

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi
1	Laminar Air Flow	buah	1	Baik
2	Oven	buah	1	Baik
3	Inkubator	buah	1	Baik
4	PCR Portebel	buah	1	Baik
5	Elektrik Bacteria Colony Counter	buah	1	Baik
6	Spektrometer	buah	1	Baik
7	Mikroskop	buah	1	Baik
8	Cool Box	buah	1	Baik
9	Freezer	buah	1	Baik
10	Autoclaf	buah	2	Baik
11	Desikator	buah	1	Baik
12	Labu Ukur	buah	4	Baik
13	Gelas Beaker	buah	14	Baik
14	Erlenmeyer	buah	14	Baik
15	Gelas Ukur	buah	15	Baik
16	Labu Destilasi	buah	2	Baik



No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi
17	Kaki Tiga	buah	5	Baik
18	Kawat Kasa	buah	5	Baik
19	Pemanas Spirtus	buah	1	Baik
20	Botol Semprot	buah	4	Baik
21	Mikropipet	buah	6	Baik
22	Termometer	buah	9	Baik
23	Pinset	buah	8	Baik
24	Aluminium Foil	gulung	2	Baik
25	Penjepit	buah	5	Baik
26	Rak Tabung Reaksi	buah	10	Baik
27	Mortal dan Pastle	buah	4	Baik
28	pH Meter	buah	1	Baik
29	pH Pen	buah	8	Baik
30	pH Tanah	buah	6	Baik
31	DO meter	buah	2	Baik
32	Lup	buah	4	Baik
33	Cawan Porselin	Buah	2	Baik
34	Spatula Porselin	Buah	2	Baik
35	Cawan Petri	Pasang	38	Baik
36	Corong	Buah	6	Baik
37	Buret	Buah	3	Baik
38	Pipet Ukur	Buah	18	Baik
39	Pipet Tetes	Buah	159	Baik
40	Pipet Volume	Buah	4	Baik
41	Batang Pengaduk	Buah	10	Baik
42	Tabung Reaksi	Buah	105	Baik
43	Slide Glass	kotak (50 bh/ktk)	7	Baik
44	Cover Glass	kotak (50 bh/ktk)	5	Baik
45	Botol Sampel	Buah	20	Baik
46	Refraktometer	Buah	6	Baik
47	Mixer	Buah	1	Baik
48	Kertas Lakmus	Pak	3	Baik
49	Kertas Saring	Gulung	0	Baik
50	Showcase	Buah	2	Baik
51	Kulkas	Buah	2	Baik
52	Timbangan Analik	Buah	2	Baik

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo



Selain sarana/prasarana tersebut di atas, guna mendukung pelaksanaan tupoksi, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo juga memiliki/menguasai barang inventaris kantor berupa mebelair, komputer, printer serta peralatan dan mesin lainnya.

Secara umum sarana dan prasarana maupun peralatan perkantoran tersebut di atas dalam kondisi baik dan masih layak untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas internal Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian sarana dan prasarana tersebut tetap harus dilakukan pemeliharaan secara rutin/berkala agar selalu siap digunakan untuk mendukung kinerja OPD tetap optimal. Selain itu, khususnya bangunan Gedung Kantor yang ada sudah tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan dokumen yang harus dikelola.

2.2.3 Sumber Daya Lainnya



Unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perikanan, Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1) Pusat Pendaratan Ikan (PPI)

Pusat Pendaratan Ikan adalah pelabuhan khusus yang merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dari aspek produksi maupun aspek pemasarannya. Dengan demikian Pusat Pendaratan Ikan merupakan prasarana ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut maupun pelayaran. Di wilayah Kabupaten Sidoarjo

terdapat 10 (sepuluh) Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan yakni kecamatan Sedati, Buduran, Candi, Tanggulangin, Waru dan Sidoarjo.

Tabel 2.6
Daftar Pusat Pendaratan Ikan Per 31 Desember 2020

No	Pusat Pendaratan Ikan	Lokasi	Jenis Konstruksi	Panjang	Kapasitas Perahu
1	PPI Tambak Oso	Desa Tambak Oso Kec.Waru	Kayu & Beton	25 M	± 60
2	PPI Segoro Tambak	Desa Segoro Tambak Kec.Sedati	Beton	6 M	± 15
3	PPI Banjar Kemuning	Desa Banjar Kemuning Kec.Sedati	Beton	25 M	± 25
4	PPI Juanda	Desa Gisik Cemandi Kec.Sedati	Beton	50 M	± 80
5	PPI Ds Gisik Cemandi	Desa Gisik Cemandi Kec.Sedati	Beton	40 M	± 40
6	PPI Ds Kepetingan	Dusun Kepetingan Desa Sawohan Kec.Buduran	Beton	20 M	± 20
7	PPI Desa Bluru Kidul	Desa Bluru Kidul Kec.Sidoarjo	Beton	20 M	± 25
8	PPI Ds. Penatarsewu	Desa Penatarsewu Kec.Tanggulangin	Beton	12 M	± 20
9	PPI Ds. Balonggabus	Desa Balonggabus Kec.Candi	Beton	10 M	± 15
10	PPI Ds. Balongdowo	Desa Balongdowo Kec.Candi	Beton	15 M	± 20

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

2) Tambak Percontohan

Dalam upaya mengembangkan tambak sebagai tempat percontohan untuk budidaya udang dan bandeng dengan menggunakan teknologi plus/semi intensif, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki aset berupa tambak seluas 18,6 ha. yang berlokasi di 3 (tiga) kecamatan dengan sebaran sebagai berikut :

- (1) Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo seluas 11 ha.
- (2) Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi seluas 6 ha.
- (3) Desa Banjar Kemuning, Kecamatan Sedati seluas 1,6 ha.



3) Depo Pemasaran Ikan

Depo Pemasaran Ikan merupakan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditujukan untuk:

- (1) Mempertahankan mutu ikan;
- (2) Meningkatkan minat beli dari masyarakat;
- (3) Meningkatkan pendapatan petani/nelayan;
- (4) Meningkatkan pendapatan asli daerah;
- (5) Meningkatkan nilai tambah produk perikanan;
- (6) Memanfaatkan sumber daya perikanan.

Depo Pemasaran Ikan tersebut berdiri di atas lahan ± 3 ha, berupa 14 (empat belas) borg ikan dan pasar ikan segar, yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur Sidoarjo. Perputaran produksi ikan di Depo Pemasaran Ikan tersebut rata – rata dapat mencapai 10-15 ton/hari.

4) Luas Tambak Ikan

Tambak ikan di Kabupaten Sidoarjo tersebar di 29 desa/kelurahan dalam 8 (delapan) wilayah kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Petani Tambak dan Pandega (PTP) Tahun 2020

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Pemilik	Pandega
1. Waru	1 Tambak Oso Tam	384,04	219	219
	2 Tambak Rejo	75,30	-	-
	3 Tambak Sumur	29,00	-	-
2. Sedati	4 Segoro Tambak	545,70	80	80
	5 Banjar Kemuning	437,00	47	47
	6 Tambak Cemandi	468,00	80	80
	7 Kalanganyar	2.231,79	98	98
	8 Buncitan	18,50	12	12
	9 Pepe	376,00	12	12
3. Buduran	10 Prasung	338,62	41	41

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Pemilik	Pandega
	11 Damarsi	228.25	25	25
	12 Sawohan	937.65	136	136
	13 Siwalan Panji	6,50	5	5
4. Sidoarjo	14 Rangkah Kidul	172.41	10	10
	15 Gebang	1.593.86	43	43
	16 Pucang Anom	439.64	16	16
	17 Bluru Kidul	49.56	30	30
	18 Kemiri	128.87	20	20
	19 Sekardangan	887.62	17	17
5. Candi	20 Kedung Peluk	1.031.65	117	117
6. Tanggulangin	21 Banjar Panji	340.93	45	45
	22 Banjar Asri	86.84	34	34
	23 Penatarsewu	68.87	96	96
7. Porong	24 Plumbon	450.39	16	16
	25 Tayono	42.35	-	-
8. Jabon	26 Permisian	873.00	38	38
	27 Tambak Kalisogo	703.00	131	131
	28 Kupang	1.381.76	105	105
	29 Kedung Pandan	1.186.31	228	228
Total		15.513.41	1.701	1.701

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Sampai dengan akhir tahun 2020, seluruh sumber daya lainnya berupa PPI, Tambak Percontohan dan Depo Pemasaran Ikan tersebut di atas dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan sesuai operasionalnya, walaupun pada beberapa lokasi terdapat fasilitas yang mengalami kerusakan ringan dan memerlukan usaha perbaikan dan pemeliharaan secara berkala agar fasilitas tersebut tetap dapat berfungsi sesuai tujuan pembangunannya.



2.3 KINERJA PELAYANAN OPD



Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan, yang secara rinci sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2018, yaitu mulai dari perumusan kebijakan teknis bidang perikanan sampai dengan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2020) tingkat pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tercermin dari realisasi capaian kinerja terhadap target pada renstra periode tersebut, serta realisasi atau penyerapan anggarannya, sebagai berikut :

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI					PERSENTASE CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Persentase Kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB	1,56	1,57	1,41	1,51	1,55	1,56	1,57	1,47	1,41	1,56	100	100	104,3	93,4	100
	Persentase peningkatan pendapatan nelayan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,07	1,17	4,30	1,02	0,56	107	117	430	102	112
	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya air payau	0,30	0,35	0,40	0,47	0,50	0,57	1,11	0,28	0,83	2,85	190	317,14	70	176,6	570
	Persentase peningkatan produksi perikanan Budidaya Air Tawar	6,30	2,78	9,08	5,35	0,01	8,75	0,39	4,33	4,06	5,95	138,89	14,03	47,69	75,89	59,5
	Nilai produk hasil olahan perikanan Krupuk udang per kg	Rp. 53.000	Rp. 56.000	Rp. 58.000	Rp. 60.000	Rp. 60.500	Rp. 55.000	Rp. 58.000	Rp. 60.000	Rp. 62.500	Rp. 60.000	103,77	103,57	103,45	104,16	99,17

Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Renstra Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI					PERSENTASE CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Nilai produksi hasil olahan perikanan Bandeng asap per kg	Rp. 120.000	Rp. 123.000	Rp. 125.000	Rp. 128.000	Rp. 127.500	Rp. 123.000	Rp. 125.000	Rp. 130.000	Rp. 132.000	Rp. 127.000	102,5	101,63	104,0	101,56	99,61
	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	28,47	29,15	31,12	39,06	39,29	28,95	30,51	38,87	39,48	39,68	101,69	104,67	124,90	101,08	100,9

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo



1. Kontribusi subsektor Perikanan terhadap PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, peran lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP) terhadap nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) terlihat stabil berada pada kisaran 2,20 %. Nilai yang dihasilkan lapangan usaha ini terlihat terus bertambah dari tahun ke tahun yaitu; 3,81 triliun rupiah atau 2,30% (2016), 4,05 triliun rupiah atau 2,33% (2017), 4,10 triliun rupiah atau 2,17% (2018), 4,22 triliun rupiah atau 2,07% (2019) dan mencapai 4,43 triliun rupiah atau 2,25% (2020).

Subsektor Perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan yaitu mencapai rata – rata 2,794 triliun rupiah atau rata –rata sebesar 67,64 persen setiap tahunnya

Tabel 2.9
Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2020

Tahun	PDRB	Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP)		Subsektor Perikanan		
	Milyar Rp	Milyar Rp	% Thd.PDRB	Milyar Rp	% Thd.PKP	% Thd.PDRB
2016	160.020,70	3.817,56	2,30	2.492,10	65,28	1,56
2017	174.188,10	4.055,64	2,33	2.742,83	67,63	1,57
2018	189.256,00	4.114,56	2,17	2.790,91	67,83	1,47
2019*	204.201,62	4.217,10	2,07	2.876,48	68,21	1,41
2020**	197.240,69	4.431,85	2,25	3.068,61	69,24	1,56
Rata2	184.981,42	4.217,34	2,22	2.794,19	67,64	1,51

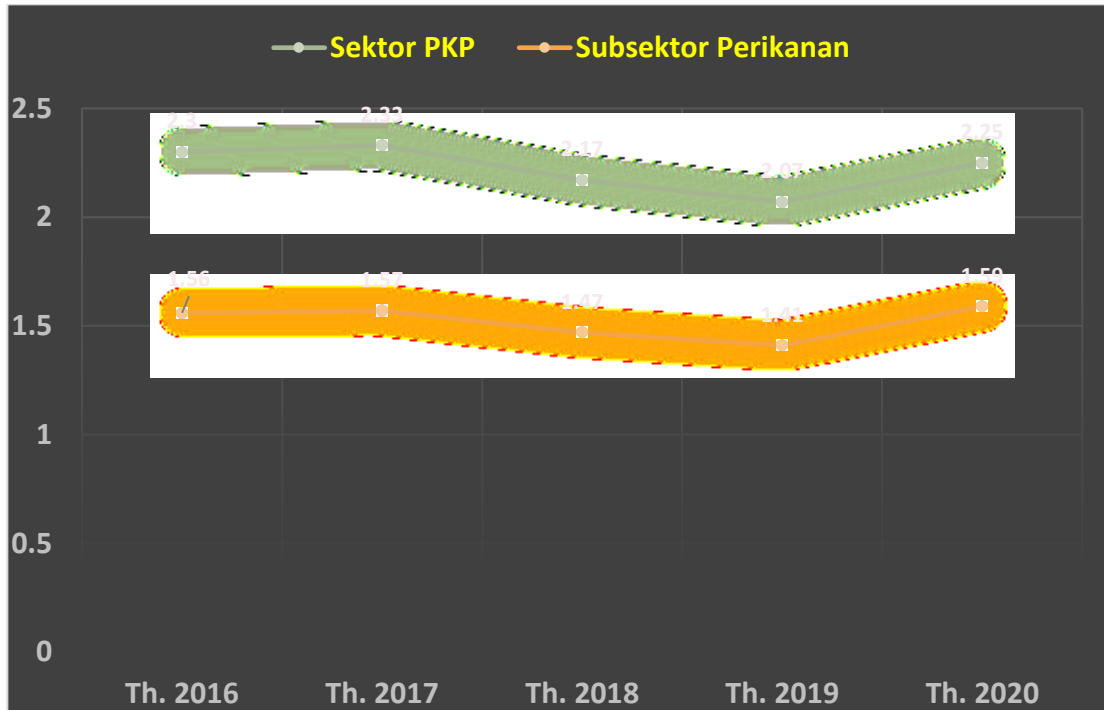
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures



Gambar 2.2
Persentase Kontribusi Sektor PKP dan Subsektor Perikanan Pada PDRB



Angka tahun 2019 dan 2020 pada tabel dan gambar di atas, sesuai rilis oleh BPS Kabupaten Sidoarjo merupakan angka sementara, namun demikian khususnya untuk tahun 2020 berdasarkan angka dari BPS tersebut capaian kontribusi subsektor perikanan pada PDRB berpotensi naik sebesar 1,56 % meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada kisaran -2,5%.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, nampak bahwa nilai PDRB subsektor perikanan selalu meningkat dari tahun ke tahun yaitu sebesar Rp2.492,10 milyar pada tahun 2016 terus meningkat menjadi sebesar Rp3.068,61 milyar pada akhir tahun 2020. Peran sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi antara 1,41 % sampai dengan 1,57 % atau rata – rata sebesar 1,51 % dan terjadi penurunan pada tahun 2018 dan 2019, namun kondisi capaian pada akhir periode relatif masih sama (stagnan) bila dibandingkan capaian pada awal periode yaitu sebesar 1,56 %.



Apabila dibandingkan dengan target kinerja setiap tahunnya, maka capaian kinerja kontribusi subsektor perikanan pada PDRB Sidoarjo berdasarkan harga berlaku selalu mencapai target yang ditetapkan, kecuali untuk tahun 2019 yang hanya mencapai 1,41% atau 93,4% dari target sebesar 1,51%



2. Peningkatan Pendapatan Bersih Nelayan

Nilai Pendapatan Bersih Nelayan setiap bulan dihitung dari rata – rata pendapatan kotor yaitu harga jual ikan hasil tangkapan, setelah dikurangi dengan biaya operasional berupa BBM dan logistik untuk bulan yang bersangkutan. Sedangkan untuk memperoleh nilai pendapatan bersih per tahun, maka hasil perhitungan per bulan tersebut dikalikan dua belas (jumlah bulan dalam 1 tahun)

Pendapatan Bersih Nelayan (tahunan) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai Rp28.466.256,00, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan sampai dengan akhir tahun 2020 Pendapatan Bersih Nelayan tersebut telah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp30.517.560,00. Dalam kurun waktu tersebut rata - rata Pendapatan Bersih Nelayan di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya adalah sebesar Rp29.562.535,00 dengan tingkat kenaikan rata – rata sebesar Rp470.628,00 atau 1,62% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada



tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp 1.240.860,00 atau 4,30% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 28.800.000, 00.

Selain itu capaian peningkatan Pendapatan Bersih Nelayan dalam periode Renstra 2016 – 2020 tersebut selalu melampaui target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana dari target persentase peningkatan pendapatan bersih pada tahun tersebut sebesar 1%, dapat tercapai sebesar 4,30 %, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu dari target sebesar 1% hanya tercapai 1,02% atau 102 %. Selengkapnya target dan realisasi Pendapatan Bersih Nelayan selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Peningkatan Pendapatan Nelayan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Target		Realisasi		
	Nilai (Rp)	Persentase Kenaikan	Nilai (Rp)	Kenaikan	Persentase Kenaikan
2016	28.164.400	1,00	28.466.256	301.836	1,07%
2017	28.466.200	1,00	28.800.000	333.744	1,17%
2018	28.730.000	1,00	30.040.860	1.240.860	4,30%
2019	29.018.000	1,00	30.348.000	307.140	1,02%
2020	29.165.000	0,50	30.517.560	169.560	0,56%
Rata rata			29.562.535	470.628	1,62%

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Keberhasilan peningkatan Pendapatan Bersih Nelayan tersebut di atas tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi Ikan Dan Pengawasan Perikanan Tangkap yang diselenggarakan pada setiap tahunnya melalui kegiatan pembinaan teknologi perikanan tangkap; pemberdayaan kelompok nelayan perikanan tangkap; pengawasan dan



pengendalian sumber daya perairan; pemberdayaan masyarakat pesisir; dan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

Adapaun produksi perikanan tangkap laut selama kurun waktu tahun 2016 s.d 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2016-2020

Tahun	Target (kg)	Realisasi		Persentase	
		Kuantitas (kg)	Kenaikan (kg)	Realisasi thd Target	Kenaikan
2016	14.900.000	14.908.760	87.650	100,06	0,58
2017	15.050.000	15.057.400	148.640	100,05	0,99
2018	15.200.000	15.219.800	162.400	100,13	1,07
2019	15.400.000	15.416.200	196.400	100,11	1,29
2020	15.600.000	15.540.300	124.100	0,99	0,80
Rata rata		15.228.492	143.838		0,95

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 hasil produksi perikanan tangkap laut rata-rata sebanyak 15.228.492 kg per tahunnya dan selalu mencapai target yang ditetapkan kecuali untuk tahun 2020 yang tercapai sedikit dibawah target (99 %). Hasil produksi tersebut juga terus mengalami peningkatan yaitu sebanyak 14.908.760 kg pada tahun 2016, meningkat menjadi 15.540 300 kg pada tahun 2020, dimana kenaikan setiap tahunnya rata - rata sebesar 143.838 kg atau 0,95 %.

Hasil produksi perikanan perairan umum daratan (PUD) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, produksi perikanan umum daratan (PUD) tahun 2018 mencapai 536.100 kg dan mengalami kenaikan sebesar 6.100 Kg, sedangkan tahun 2019 sebesar 547.800 kg mengalami kenaikan sebesar 11.700



kg, dan tahun 2020 sebesar 553.200 kg mengalami kenaikan sebesar 5.400 kg sebagaimana dalam tabel Perikanan Umum Daratan (PUD) sebagai berikut :

Tabel 2.12
Produksi Perikanan Umum Daratan Tahun 2016-2020

Tahun	Target (kg)	Realisasi		Persentase	
		Kuantitas (kg)	Kenaikan (kg)	Realisasi thd Target	Kenaikan
2016	525.000	525.050	3.340	100,01	0,64
2017	530.000	530.000	4.950	100,00	0,94
2018	536.000	536.100	6.100	100,01	1,15
2019	543.000	547.800	11.700	100,88	2,18
2020	550.000	553.200	5.400	100,58	0,98
Rata rata		538.430	6.298		1,18

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Namun demikian, masih dijumpai permasalahan terkait dengan peningkatan produksi perikanan tangkap tersebut, yaitu:

- Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap,
- Belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI)
- Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan rebug nelayan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Kurangnya kesadaran Nelayan untuk mencatat hasil tangkapannya secara rutin sehingga data produksi perikanan menjadi kurang uptodate.
- Terjadinya penurunan stok sumberdaya Ikan di perairan umum daratan
- Adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang
- Kurangnya kesadaran Nelayan untuk segera menggunakan secara optimal dan melakukan perawatan atau pemeliharaan sarana prasarana perikanan tangkap yang telah diberikan.



3. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Kuantitas produksi perikanan budidaya air payau selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 selalu meningkat pada setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Tahun 2016 - 2020

Tahun	Target		Realisasi		
	Kuantitas (Kg)	% Kenaikan	Kuantitas (Kg)	Kenaikan (Kg)	% Kenaikan
2016	75,311,057	0,30%	74,884,800	426.257	0,57%
2017	75,574,645	0,35%	75,719,740	834.940	1,11%
2018	75.877.437	0,40%	75.932.450	212.710	0,28%
2019	76.236.179	0,47%	76.568.500	636.050	0,83%
2020	76.617.359	0,50%	78.750.800	2.182.300	2,85%
Rata rata			76.369.458	858.451	1,13%

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel di atas nampak bahwa hasil produksi perikanan budidaya air payau dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 setiap tahun rata – rata mencapai 76.369.458 kg. Hasil produksi tersebut selalu meningkat rata – rata sebesar 1,13 % pada setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan terjadi pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2020, dengan realisasi produksi mencapai 78.750.800 kg, naik sebanyak 2.182.300 kg atau 2,85% dari hasil produksi pada tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, hasil produksi perikanan budidaya air payau di Sidoarjo tersebut selalu melebihi target yang ditetapkan pada setiap tahunnya kecuali untuk tahun 2016, dimana realisasi hasil produksi pada tahun tersebut hanya mencapai 74,884,800 kg atau 99,43% dari target sebanyak 75,311,057 kg. Selain itu dari sisi target persentase peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, hanya tahun 2018 yang tidak mencapai target,



yaitu hanya tercapai 212.710 kg (0,28%) atau 70,24% dari target peningkatan sebanyak 302.793 kg (0,40%). Namun demikian untuk tahun – tahun lainnya, persentase kenaikan produksi perikanan budidaya air payau tersebut realisasinya selalu melampaui target yang ditetapkan untuk masing masing tahun.

4. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Realisasi produksi perikanan budidaya air tawar di Sidoarjo selama lima tahun terakhir (2016 – 2020) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Tahun 2016 - 2020

Tahun	Target		Realisasi		
	Kuantitas (Kg)	Persentase Kenaikan	Kuantitas (Kg)	Kenaikan (Kg)	Persentase Kenaikan
2016	18,186,396	6,30	19,718,950	1.586.950	8,75
2017	18,691,970	2,78	19.796.050	77.100	0,39
2018	20.389.932	9,08	20,653,734	857.684	4,33
2019	21.479.883	5,35	21.493.180	839.446	4,06
2020	21.479.900	0,01	22.773.775	1.280.595	5,95
Rata rata			20.887.138	928.355	4,70

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel tersebut nampak bahwa kuantitas hasil produksi perikanan budidaya air tawar di Sidoarjo selama lima tahun terakhir (2016 – 2020) selalu meningkat pada setiap tahunnya, namun persentase kenaikannya sangat berfluktuasi antara 0,39 % sampai dengan 8,75 %, atau rata-rata setiap tahunnya meningkat sebesar 4,70% dari hasil produksi tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan target kuantitas setiap tahunnya, walaupun hasil produksi tersebut selalu tercapai melampaui target yang ditetapkan, namun



secara persentase kenaikan produksi, pada beberapa tahun tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu :

- Tahun 2017 : kenaikan produksi hanya mencapai 0,39 % (atau 14,03 % dari target 2,78 %)
- Tahun 2018 : kenaikan produksi hanya mencapai 4,33 % (atau 47,69 % dari target 9,08 %)
- Tahun 2019 : kenaikan produksi hanya mencapai 4,06 % (atau 75,89 % dari target 5,35 %)

Keberhasilan peningkatan produksi perikanan budidaya air payau maupun air tawar tersebut di atas tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang diselenggarakan pada setiap tahunnya melalui kegiatan; pembinaan dan percontohan budidaya ikan, pemberian hibah sarana dan prasarana perikanan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, serta fasilitasi Balai Benih Ikan (BBI) dan Tambak Dinas. Selain itu juga karena sebagian besar para nelayan telah menerapkan hasil pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kelembagaan, kapasitas nelayan, diversifikasi hasil perikanan, penanganan ikan segar yang cepat, rapi dan bersih, serta pemberian permodalan kepada nelayan dengan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga.

Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan yang memerlukan solusi penanganannya agar capaian kinerja tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, yaitu :

- ~ Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya
- ~ Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) oleh pembudidaya
- ~ Persebaran serangan penyakit ikan sangat cepat dan tidak dapat diprediksi,
- ~ Kurangnya kesadaran pembudidaya terhadap penggunaan obat ikan yang dilarang,



- ~ Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air kolam/tambak akibat dari pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga serta tingginya sedimentasi dan terjadinya penyempitan saluran tersier sehingga kurang berfungsi secara optimal sebagai sumber air tambak
- ~ Kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya seperti balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi,
- ~ Kurangnya kemampuan SDM pembudidaya yang sebagian besar merupakan masyarakat tradisional dan belum begitu terbuka untuk suatu inovasi sehingga sulit untuk menjalankan pengembangan manajemen usaha perikanan.

5. Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan.

Produk olahan hasil perikanan sudah beragam dari yang menggunakan nama (*brand*) lokal dengan bentuk yang spesifik sampai yang modern dengan formulasi khusus. Peluang usaha semakin terbuka untuk pasar produk olahan hasil perikanan sehingga memungkinkan setiap anggota pembudidaya ikan atau nelayan dapat terjun langsung menjadi pengolah dan pemasar produk olahan hasil perikanan.

Hasil perikanan yang merupakan unggulan di Kabupaten Sidoarjo selain udang adalah ikan bandeng. Oleh karena itu nilai tambah produk olahan hasil perikanan tersebut yaitu krupuk udang dan bandeng asap, menjadi salah satu indikator strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Nilai tambah (*value added*) merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya termasuk tenaga kerja. Realisasi nilai tambah produk olahan hasil perikanan yang sangat dominan di Sidoarjo, yaitu krupuk udang dan bandeng asap adalah sebagai berikut :



Tabel 2.15
Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Krupuk Udang			Bandeng Asap		
	Target (Rp/Kg)	Realisasi (Rp/Kg)	Persentase	Target (Rp/Kg)	Realisasi (Rp/Kg)	Persentase
2016	53.000	55.000	103,70	120.000	123.000	102,50
2017	56.000	58.000	103,57	123.000	125.000	101,62
2018	58.000	60.000	103,44	125.000	130.000	104,01
2019	60.000	62.500	104,16	128.000	132.500	103,51
2020	60.500	60.000	97,17	127.500	127.500	99,60
Rata rata		59.100			127.600	

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel tersebut nampak bahwa sejak tahun 2016 nilai tambah produksi olahan hasil perikanan yang menjadi unggulan Kabupaten Sidoarjo terutama krupuk udang dan bandeng asap selalu meningkat dan melampaui target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, kecuali yang terjadi pada 2020. Pada tahun tersebut nilai tambah produk krupuk udang hanya mencapai Rp60.000,00 per kilogram (kg) atau 99,17% dari target yang ditetapkan, dan menurun sebesar Rp2.500,00 per kg atau 4% dari tahun sebelumnya (2018).

Hal - hal yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan nilai tambah produk olahan hasil perikanan, antara lain ;

- Perlunya keamanan produk olahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu yang bebas dari penggunaan bahan terlarang seperti formalin.
- Sarana dan prasarana pendukung proses produksi maupun pasca produksi masih sangat terbatas;
- Masih rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, terutama oleh usaha tradisional sesuai selera konsumen dan standarisasi mutu



- Penanganan pasca produksi olahan hasil perikanan masih dilakukan secara tradisional dan belum sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedure) maupun GMP (Good Manufacturing Product).
- Terjadinya pandemic covid-19 dan adanya pembatasan social maka para pengolah hanya memproduksi jika ada pesanan (jika tidak ada pesanan tidak memproduksi) sehingga omset menjadi turun.

6. Angka konsumsi Ikan.

Tingkat konsumsi ikan atau sering dikenal dengan istilah Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita per- tahun.

Realisasi capaian kinerja Angka Konsumsi Ikan masyarakat Sidoarjo bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama periode tahun 2016 - 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Target dan Realisasi Angka Konsumsi Ikan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	28,47	28,95	101,69
2017	29,15	30,51	104,67
2018	31,12	38,87	124,90
2019	39,06	39,48	101,08
2020	39,29	39,68	100,99
Rata rata		35,50	

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo selalu meningkat dari tahun ketahun, yaitu dari 28,95 kg/kapita/thn pada tahun 2016 realisasinya terus meningkat sampai 39,68 kg/kapita/thn pada tahun 2020, atau rata – rata 35,50 kg/kapita/thn. Selain itu rasio capaian tingkat konsumsi



ikan dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang ditetapkan atau dengan kata lain rasio capaian lebih dari 100%. Untuk rasio capaian tingkat konsumsi ikan paling kecil terjadi pada tahun 2020 yaitu 100,99%, sedangkan rasio capaian tingkat konsumsi ikan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 124,90%

7. Penyerapan Anggaran

Perkembangan penyediaan anggaran yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sidoarjo dan relaisasi penyerapan dan penggunaannya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel 2.17
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020

No	Belanja / Program	Anggaran pada Tahun.					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	TOTAL BELANJA	29.432.252.905	18.559.827.873	20.511.777.942	25.951.946.542	45.754.341.206	28.148.580.756	16.324.522.577	17.199.549.756	23.241.030.870	43.864.277.295	95,64	87,95	83,85	89,55	95,87
A	BELANJA TDK LANGSUNG	3.773.282.166	5.051.347.000	5.736.668.800	5.189.263.473	6.072.240.816	3.484.769.611	4.292.083.625	3.974.949.982	4.745.086.206	5.419.545.451	92,35	84,97	69,29	91,44	89,25
B	BELANJA LANGSUNG	25.658.970.739	13.508.480.873	14.775.109.142	20.762.683.069	39.682.100.390	24.663.811.125	12.032.438.952	13.224.599.744	18.495.944.664	38.444.731.844	96,12	89,07	89,51	89,08	96,88
1	Program Pelayanan kesekretariatan	1.794.001.596	2.085.025.000	2.010.856.389	2.421.142.913	1.903.246.279	1.686.187.741	1.663.720.691	1.850.670.248	2.284.010.343	1.615.660.106	93,99	79,79	92,03	94,34	79,64
2	Program Peningkatan prod. perikanan tangkap dan garam	417.721.000	1.492.975.000	667.225.500	587.774.780	324.106.180	391.672.264	1.303.759.504	650.741.909	511.811.759	307.030.422	93,76	87,33	97,53	87,08	94,73
3	Program Peningkatan Prod.Perikanan Budidaya	22.688.248.143	8.346.240.873	9.920.655.503	16.364.007.276	36.890.147.856	21.909.262.540	7.751.601.587	9.326.406.867	14.194.124.041	35.975.060.427	96,66	92,88	94,01	86,74	97,52
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	759.000.000	1.584.240.000	2.176.371.750	1.569.758.100	564.600.075	676.688.100	1.313.357.170	1.396.780.750	1.505.998.521	546.980.889	89,16	82,90	64,18	95,94	96,88

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo



Berdasarkan data dalam tabel 2.17 di atas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 penyediaan pendanaan dari APBD khususnya Belanja Langsung untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi yaitu sebesar Rp 25,658 milyar pada tahun 2016, menurun menjadi Rp 13,508 milyar (2017), kemudian naik menjadi Rp 14,775 milyar (2018), Rp 20,762 milyar (2019), dan menjadi Rp 39,682 milyar (2020). Dari penyediaan dana Belanja Langsung tersebut bagian terbesar adalah untuk pendanaan kegiatan yang berkaitan dengan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 22,688 milyar (88,42%), tahun 2017 Rp 8,346 milyar (61,79%), tahun 2018 Rp 9,920 milyar (67,4%), tahun 2019 Rp 16,364 milyar (78,82%), dan tahun 2020 sebesar Rp 36,890 milyar (92,96%).

Tidak terdapat kendala yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan belanja adalah sebesar 95,64% (2016), 87,95% (2017), 83,85% (2018), 89,55% (2019), dan 95,87% (2020) atau rata – rata 90,57%. Sedangkan untuk Belanja Langsung rata – rata penyerapan anggaran selama lima tahun tersebut rata – rata sebesar 92,13% dimana sisa anggaran yang ada merupakan efisiensi dari pelaksanaan lelang (tender).

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan lima tahun terakhir, analisis terhadap dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dokumen RTRW dan KLHS dapat diidentifikasi potensi tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedepan.

Tantangan dalam pengembangan pelayanan bidang perikanan sesuai kewenangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal



- b. rendahnya tingkat kemandirian kelompok pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil terhadap orientasi pada penerapan teknologi, sehingga produktivitasnya kurang optimal dan nilai tambahnya masih relatif kecil
- c. penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, degradasi ekosistem,, cuaca ekstrim serta pemanfaatan lahan yang belum optimal
- d. Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan
- e. stabilitas ketersediaan bahan baku
- f. Akses permodalan untuk untuk mendukung peningkatan skala usaha perikanan maupun daya saing dan mutu produk perikanan
- g. sarana prasarana pendukung yang belum seluruhnya memadai dan terjadinya degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim

Peluang dalam melaksanakan pengembangan pelayanan bidang perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang perikanan.
- b. Potensi sumber daya perikanan tangkap maupun budidaya dan pesisir yang cukup besar.
- c. Penetapan kawasan berdasarkan agropolitan memberikan arahan pengembangan komoditas perikanan sesuai perwilayahan dan pusat kegiatan.
- d. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan
- e. Teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan yang semakin berkembang
- f. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi.





BAB III

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II, a permasalahan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maupun pencapaian kinerjanya pada periode Renstra sebelumnya adalah :

1. Permasalahan pengembangan perikanan tangkap
 - ~ Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap,
 - ~ Belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI)
 - ~ Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan rebug nelayan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
 - ~ Belum optimalnya penyediaan data produksi perikanan tangkap terkini.
 - ~ Terjadinya penurunan stok sumberdaya Ikan di perairan umum daratan
 - ~ Kurangnya kesadaran Nelayan terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang dan kesadaran untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan sarana prasarana perikanan tangkap yang telah diberikan
2. Permasalahan pengembangan perikanan budidaya
 - ~ Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya
 - ~ Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
 - ~ Persebaran serangan penyakit ikan sangat cepat dan tidak dapat diprediksi,



- ~ Kurangnya kesadaran pembudidaya terhadap penggunaan obat ikan yang dilarang,
 - ~ Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air kolam/tambak serta tingginya sedimentasi dan terjadinya penyempitan saluran tersier sehingga kurang berfungsi secara optimal sebagai sumber air tambak
 - ~ Kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya seperti balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi,
 - ~ Kurangnya kemampuan SDM pembudidaya untuk suatu inovasi sehingga sulit untuk menjalankan pengembangan manajemen usaha perikanan.
3. Permasalahan pengembangan bina usaha perikanan
- ~ Perlunya keamanan produk olahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu yang bebas dari penggunaan bahan terlarang seperti formalin.
 - ~ Sarana dan prasarana pendukung proses produksi maupun pasca produksi masih sangat terbatas;
 - ~ Masih rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, terutama oleh usaha tradisional sesuai selera konsumen dan standarisasi mutu
 - ~ Penanganan pasca produksi olahan hasil perikanan masih dilakukan secara tradisional dan belum sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedure) maupun GMP (Good Manufacturing Product)
4. Sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sarana/prasarana terutama gedung kantor yang dimiliki, luasnya sudah tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan dokumen yang harus dikelola, sehingga kurang mendukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan tugas - tugas internal



3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih.



Dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan yang merupakan gambaran terwujudnya masyarakat Sidoarjo masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur,

dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen tersebut merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih periode tahun 2021-2026 telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**.

Yang dimaksud dengan **“Sidoarjo Sejahtera”** adalah menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.



"Sidoarjo Maju" merupakan manifestasi dari diksi "Menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang

"Sidoarjo Berkarakter" merupakan nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat dan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

Sedangkan "Pembangunan Berkelanjutan" merupakan pembangunan yang dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selain mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo juga mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 – 2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;



2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya;
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang dikembangkan dalam RPJMD tersebut terkait Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan, antara lain :

- a. Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sector informal dan usaha mikro,
- b. Memperluas Lapangan Kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha.
- c. Penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas unggulan local yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- e. Diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
- f. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- g. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.



- h. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
- i. Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis, industri kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.

Selain itu dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo tersebut juga dikembangkan isu-isu strategis terkait Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, yang meliputi :

- a. Mewujudkan good governance melalui pengelolaan pemerintahan yang Tangkas, Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya,
- b. Penguatan komitmen ASN, penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis Information and Communication Technology (ICT).
- c. Pengembangan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
- d. Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e. Dukungan inovasi pelayanan publik 24 jam

Sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, maka terkait dengan Misi RPJMD tersebut di atas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mendukung pencapaian Misi -2 RPJMD yaitu;

“Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan”

Pada Misi ini, difokuskan pada percepatan dan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan dapat menanggulangi



kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan simultan berupa penguatan sektor strategis dan pengembangan sector ekonomi rakyat yaitu Usaha Mikro, Koperasi dan Pertanian serta Perikanan. Misi ini juga akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah. Misi 2 tersebut dijabarkan dalam dua tujuan dan empat sasaran sebagai berikut :

Misi 2	Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
Tujuan 1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.
Sasaran 1	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.
Sasaran 2	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa
Tujuan 2	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan
Sasaran 3	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran
Sasaran 4	Menurunnya Penduduk Miskin



Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan serta tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi antara lain : Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Terkait dengan Misi 2 RPJMD, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tersebut mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan”

Sasaran 1 : “Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan”

Selain **Visi** dan **Misi** tersebut di atas, Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya **17 Program Prioritas**, yaitu:

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp 5 Juta – Rp 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp 6 Juta Operasional RT Per Tahun
8. Dua puluh ribu (20.000) UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kabupaten dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer



12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respons Cepat
16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif
17. Perluas RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Terkait dengan **17 Program Prioritas** Bupati/Wakil Bupati terpilih, tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mendukung Program ke 1 yaitu **"100.000 Lapangan Kerja Baru"**

Hal - hal yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas antara lain :

- a) Belum optimalnya menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan belum semua pembudidaya memahami tentang penggunaan obat ikan yang dilarang.
- b) persebaran serangan penyakit ikan sangat cepat dan tidak dapat diprediksi,
- c) menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air kolam/tambak akibat dari pencemaran limbah industry dan limbah rumah tangga
- d) sarana dan prasarana budidaya kurang memadai
- e) berkurangnya populasi ikan di perairan umum daratan
- f) masih terdapat Nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang
- g) sarana prasarana perikanan tangkap yang telah diberikan tidak segera dipergunakan dan dilakukan perawatan secara optimal sehingga sarana prasarana perikanan tangkap mengalami kerusakan dan akan mengganggu aktivitas Nelayan

Adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo baik eksekutif maupun legislatif dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor perikanan dan produk - produk unggulan daerah, menjadi faktor pendorong dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai tujuan dan sasaran.



Guna menunjang penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas yang juga merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo juga mendukung pencapaian Misi kesatu RPJMD yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”.

Pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan pada Dokumen Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024. Adapun uraian singkat mengenai Renstra KKP 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang



Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang - undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi KKP, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menjabarkan misi pembangunan tersebut dengan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan (KP) :
 - a. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat;
 - b. Inovasi dan riset KP menguat.
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional:
 - a. Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal;
 - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
 - c. Pengawasan pengelolaan sumber daya KP menguat;
 - d. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat;
 - e. Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP
 - ~ Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal



4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

~ Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Meningkat

Berdasarkan misi dan tujuan tersebut di atas, KKP menetapkan Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan berikut indikatornya yang merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/ impact yaitu:

SS - 1	Kesejahteraan masyarakat KP meningkat	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) 59,16 → 63,87
SS - 2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	<ul style="list-style-type: none">• Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan 7,9 % → 8,71%• Nilai ekspor hasil perikanan USD 6,17 miliar → USD 8,00 miliar• Konsumsi ikan (kapita/thn) 56,39 kg → 62,05 kg
SS - 3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ≤64% → ≤80%• Luas kawasan konservasi perairan 23,40 juta ha → 26,90 juta ha
SS - 4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan wirausaha 60% → 75%
SS - 5	Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/ diterapkan 5 → 15
SS - 6	Tata kelola SDKP bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none">• WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola 3 → 11• Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir 24 RZ → 102 RZ• Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Compliance) 94% → 98%
SS - 7	Industrialisasi KP berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">• Produksi perikanan 26,46 jt ton → 32,75 jt ton



		<ul style="list-style-type: none"> • Produksi garam 3 jt ton → 3,4 jt ton
SS – 8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing 54% → 75% • Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan 93% selama 5 tahun
SS - 9	Tatakelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP 71 → 75 • Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP 88 → 90

Berdasarkan dokumen Renstra KKP 2020 – 2024 tersebut, maka misi, tujuan dan sasaran KKP yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah :

Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.	
Tujuan a	Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
Sasaran 2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan 7,9 % → 8,71%
Tujuan b	Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
Sasaran 7	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing <ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan 26,46 jt ton → 32.75 jt ton • Produksi garam 3 jt ton → 3,4 jt ton



Permasalahan pengembangan perikanan yang dapat menjadi penghambat antara lain :

- ~ belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan,
- ~ terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu,
- ~ harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien,
- ~ kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya,
- ~ produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung

Optimalisasi dan pemanfaatan potensi daya saing industri perikanan nasional yang dimiliki, merupakan tantangan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, upaya untuk menanganani permasalahan permodalan, juga perlu ditingkatkan guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

3.4 TELAAHAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode RPJMD 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah: “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.



Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam empat misi yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 disusun mengacu pada misi pertama RPJMD Provinsi Jawa Timur pada tujuan “Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung koneksifitas antar wilayah” dengan sasaran “Meningkatnya nilai tambah produksi, pertanian, kehutanan dan perikanan”. Berdasarkan acuan tersebut di atas, dalam Renstra tahun 2019 – 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan adalah “Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan”, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						Kondisi kinerja akhir periode renstra
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan		Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	4,90	4,95	5,00	5,05	5,10	5,15	5,15
	Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	7,50
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP	86,91	87,41	87,91	88,41	88,91	89,41	89,41

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo telah selaras untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tersebut yaitu melalui pelaksanaan kegiatan utama yaitu :

- ~ Perikanan tangkap, meliputi pemberdayaan nelayan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan dan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- ~ Produksi budidaya, meliputi pemberdayaan pembudidaya dan sarana prasarana budidaya dan kesehatan ikan serta lingkungannya; dan
- ~ Pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan meliputi pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk , pelayanan usaha , promosi dan logistic serta depo ikan.

Dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tersebut tidak terdapat informasi tentang rincian (break-down) target indikator tujuan dan sasaran untuk setiap kabupaten/kota sehingga tidak diketahui berapa target yang yang harus dicapai untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo.



Permasalahan yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah belum optimalnya :

- ~ produksi dan produktifitas perikanan budidaya
- ~ produksi dan produktifitas perikanan tangkap
- ~ daya saing pengolahan dan pemasaran produk perikanan
- ~ produksi garam rakyat
- ~ mutu produk olahan hasil perikanan
- ~ tingkat kelangsungan hidup benih
- ~ kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan

Sedangkan hal hal yang menjadi factor pendorong adalah : adanya dukungan Pemerintah dalam kebijakan dan implementasinya pada subsektor kelautan dan perikanan; teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan yang semakin berkembang; tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi; dan makin bertambahnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).

3.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, beserta pembiayaannya yang didasarkan atas tata ruang, dan (2) Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya



guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
- c. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

Pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dapat menjadi **pendorong** dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan adalah :

1. Penetapan Pola Ruang untuk kawasan budidaya berupa “Kawasan Perikanan” yang terdapat di wilayah :

a.	Kecamatan Waru	seluas	402,20	Ha
b.	Kecamatan Sedati	seluas	1.919,13	Ha
c.	Kecamatan Buduran	seluas	1.731,20	Ha
d.	Kecamatan Sidoarjo	seluas	3.127,90	Ha
e.	Kecamatan Candi	seluas	1.031,70	Ha
f.	Kecamatan Tanggulangin	seluas	496,60	Ha
g.	Kecamatan Porong	seluas	496,30	Ha
h.	Kecamatan Jabon	seluas	4.144,10	Ha

Jumlah			13.349,13	Ha
---------------	--	--	------------------	-----------



2. Ketetapan bahwa upaya pengelolaan kawasan perikanan dilakukan dengan:
 - a. Melindungi kawasan tambak yang ada dari perkembangan kegiatan industri dan permukiman
 - b. Mengendalikan laju perubahan penggunaan lahan dari tambak menjadi permukiman atau industri
 - c. Melindungi kawasan perikanan tambak maupun sungai dari pencemaran oleh limbah industri.
 - d. Budidaya tambak diarahkan pada daerah yang telah ditentukan dengan memperhatikan kawasan pantai.
 - e. Kawasan tambak yang berbatasan dengan sungai harus memperhatikan sempadan sungai, demikian juga bila berbatasan dengan pantai.
 - f. Pengembangan kawasan tambak perlu diimbangi dengan peningkatan normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi tambak
3. Adanya penetapan kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi untuk pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana di sektor perikanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019–2039,
4. Strategi untuk mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana di sektor perikanan meliputi sarana pasar dan pengolahan hasil tangkapan ikan; dan sarana transportasi sungai seperti dermaga pemberhentian kapal serta tempat penyeberangan di daerah perikanan.
5. Indikasi program sektor perikanan pada pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, antara lain :
 - 1) Program pengaturan penguasaan dan pemanfaatan areal budidaya tambak
 - 2) Program peningkatan produktivitas hasil perikanan



- 3) Program pengembangan kawasan agropolitan perikanan
- 4) Program pemanfaatan areal kolam air tawar.
- 5) Program pengembangan sentra pembenihan ikan.
- 6) Program pengembangan usaha perikanan tangkap
- 7) Program pengembangan perikanan darat
- 8) Program peningkatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil
- 9) Program peningkatan standar mutu produk
- 10) Program pemanfaatan teknologi tepat guna spesifikasi ramah lingkungan
- 11) Program peningkatan prasarana produk

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo permasalahan yang dapat menjadi faktor **penghambat** dalam rangka pencapaian tujuan RT/RW adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai zonasi
- b. Adanya alih fungsi lahan pertambakan menjadi kawasan perumahan, industri, pergudangan dan lainnya.
- c. Kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya seperti balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi
- d. Belum optimalnya keterpaduan antara kawasan perkotaan dan perdesaa

3.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Tujuan KLHS menurut Peraturan



Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan/ atau program yang akan atau sudah ditetapkan.

Dokumen KLHS RPJMD Kabupten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 menginformasikan bahwa Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Sidoarjo tersebar di Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong dan Kecamatan Jabon. Sedangkan Kawasan Sentra Industri yang terkait dengan usaha perikanan adalah:

- Sentra industri kerupuk ikan terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon
- Sentra industri bandeng terletak di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
- Sentra industri udang windu terletak di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi dan Desa Kedung Pandan Kecamatan Jabon dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
- Sentra industri kupang terletak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi
- Sentra Industri ikan asin terletak di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati

Sesuai dengan hasil kajian lingkungan hidup strategis dalam dokumen tersebut di atas dapat didientifikasi hal – hal yang menjadi **pendorong** dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan adalah tingginya daya dukung lingkungan di Kabupaten Sidoarjo dari jasa – jasa ekosistem sebagai berikut:



- **Sumber daya genetik**
Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Sumber daya genetik yang terlihat dari keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan diatas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup.
- **Pengolahan dan Penguraian Limbah.**
Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan
- **Pengendalian Hama dan Penyakit**
Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit.
- **Produksi Primer**
Produksi primer adalah produksi senyawa organik dari karbon dioksida di udara atau air yang didominasi oleh proses fotosintesis dan kurang memerlukan kemosintesis. Hampir semua makhluk hidup di Bumi



secara langsung atau tidak langsung bergantung pada produksi primer. Organisme yang melakukan produksi primer disebut produsen primer atau autotrof dan membentuk dasar rantai makanan. Di ekoregion darat, sebagian besar organisme tersebut berupa tumbuhan, sementara ecoregion laut didominasi oleh ganggang

- Siklus hara

Siklus Hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme

Adapun hal-hal yang dapat menjadi **penghambat** dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan adalah :

- Rendahnya Kualitas air permukaan :

Menurunnya kualitas air akibat pencemaran, dan krisis air yang terjadi karena kurangnya ketersediaan air dan terjadinya erosi akibat pembabatan hutan di hulu serta perubahan pemanfaatan lahan di hulu dan hilir. Banyaknya sektor industri di Kabupaten Sidoarjo yang berkembang cukup pesat mempengaruhi kualitas air di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian air limbah yang dihasilkan industri harus memenuhi standar baku mutu air agar tidak mencemari air badan air penerima. Selain faktor pemicu dari aspek demografi, faktor lain yang menyebabkan penurunan kualitas air adalah sistem pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal. Penyebab utama pengelolaan limbah domestik belum optimal karena banyaknya sumber pencemar yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi (non-point sources) di Kabupaten Sidoarjo, seperti: kegiatan rumah tangga atau pemukiman yang tidak dilengkapi dengan IPAL Komunal, kegiatan pertanian dan peternakan. Berdasarkan status mutu air pada tiga saluran yang dijadikan penelitian didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 adalah 49,05 (masuk kategori Waspada). Jika dibanding tahun 2018, terjadi penurunan Indeks



Kualitas Air dari 49,59 menjadi 49,05. Sedangkan pada tahun 2017 indeks kualitas air sebesar 49,77.

- Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Seluruh Wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan dataran dan kawasan delta Sungai Brantas sehingga hampir semua lahan tergolong subur untuk pertanian dan perkebunan, dan yang terletak di pesisir sesuai untuk perikanan. Kawasan lindung hanya dijumpai di pesisir berupa hutan mangrove. Potensi sumberdaya mineral jarang dijumpai. Kualitas air tanah kurang baik untuk air minum, tetapi cukup sesuai untuk irigasi. Dengan berkembangnya sebagian wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi kawasan industri, permukiman dan perdagangan / perkotaan, pemanfaatan sumberdaya alam yang paling besar adalah pemanfaatan lahan yang subur untuk kawasan tersebut. Dari tahun ke tahun luas lahan untuk pertanian dan perikanan semakin menurun

- Rendahnya daya dukung lingkungan di Kabupaten Sidoarjo dari jasa – jasa ekosistem sebagai berikut:

- ~ Pemurnian Air

Kemampuan pemurnian air secara alami (self purification) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam. Secara fisik, pemurnian air terjadi karena siklus hidrologi yang salah satu prosesnya adalah penguapan/ evaporasi, dengan adanya proses evaporasi yang terjadi akibat interaksi antara air dan panas dari matahari, air yang sudah tercampur dengan material terlarut akan dipisahkan karena molekul air murni akan menguap dan terkondensasi menjadi awan yang kemudian turun kembali dalam bentuk hujan.

- ~ Pengaturan Tata Aliran dan Banjir.

Kawasan rawan banjir yang ada di Kabupaten Sidoarjo ada di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi,



Kecamatan Porong, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sedati, dan Kecamatan Sukodono.

~ Pengaturan, Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana, namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan di subsektor perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju, serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Isu-isu Strategis pembangunan yang dikembangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 – 2026 merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo isu – isu strategis dalam Dokumen RPJMD tersebut terkait dengan isu “Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan” yang meliputi :



- Penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas unggulan lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal local berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.

Perkembangan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB, khususnya peningkatan kontribusi subkategori perikanan pada PDRB Kabupaten Sidoarjo menjadi target utama yang harus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain; belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, dan penyediaan data produksi perikanan tangkap terkini, adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) serta terjadinya penurunan stok sumberdaya Ikan di perairan umum daratan dan kurangnya kesadaran nelayan terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya antara lain belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan penerapan CBIB , persebaran serangan penyakit ikan sangat cepat dan tidak dapat diprediksi, tingginya sedimentasi dan terjadinya penyempitan saluran tersier serta menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air kolam/tambak, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya, kurangnya kesadaran pembudidaya terhadap penggunaan obat ikan yang dilarang, dan kurangnya kemampuan SDM pembudidaya untuk suatu inovasi dalam menjalankan pengembangan manajemen usaha perikanan.

Permasalahan pengembangan bina usaha perikanan antara lain: keamanan produk olahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana



pendukung proses produksi maupun pasca produksi masih sangat terbatas, kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, terutama oleh usaha tradisional, dan penanganan pasca produksi olahan hasil perikanan masih dilakukan secara tradisional dan belum sesuai dengan SOP maupun GMP.

Terkait dengan hal tersebut maka isu-isu strategis di tingkat pelaksanaan urusan perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo diidentifikasi dari permasalahan tersebut di atas dan sekaligus bersumber dari hasil telaah terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Renstra KKP, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat. Isu - isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB subkategori perikanan,
2. Masih rendahnya kapasitas nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap,
4. Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya,
5. Masih rendahnya tingkat kemandirian kelompok masyarakat pelaku usaha pembudidayaan ikan,
6. Belum efektifnya penerapan sistem penangkapan dan budidaya ikan yang tidak merusak lingkungan,
7. Belum optimalnya sistem logistik dan distribusi hasil perikanan,
8. Belum optimalnya peningkatan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, dan
9. Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk menghadapi persaingan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026 disusun dengan berlandaskan Visi : “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam 5 Misi untuk mewujudkannya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mendukung pencapaian Misi ke 2 RPJMD yaitu : “Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan”). Adapun Tujuan RPJMD dari Misi kedua tersebut adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan”, yang akan dicapai melalui Sasaran RPJMD : “Berkembangnya perdagangan, industri, investasi, pertanian, dan perikanan” dengan salah satu



indikatornya adalah “Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas”.

Atas dasar Misi ke 2, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo menetapkan Tujuan dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 yaitu “Meningkatkan kontribusi subsektor perikanan pada PDRB”, dengan Indikator: “Laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan”

Dalam rangka perencanaan pembangunan yang berkualitas, rumusan Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas mempunyai makna sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2021 – 2026
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada bidang perencanaan pembangunan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- d. Memiliki orientasi ke masa depan
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan juga stakeholders.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sasaran merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, agar tujuan organisasi tersebut dapat terlaksana dan berhasil



dengan baik, tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo menetapkan Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yaitu: “Berkembangnya subsektor perikanan”






Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perikanan meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta penyelenggaraan administrasi yang berdaya berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, serta berhasil guna atau pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, pelaksanaan urusan tersebut di atas secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, juga telah ditetapkan Sasaran “**Terselenggaranya pelayanan kesekretariatan yang memuaskan**” yang sekaligus menjadi salah satu penjabaran dari Misi Kesatu RPJMD dengan Tujuan yakni “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha”.

Terkait dengan pelaksanaan 17 Program Prioritas / Strategis Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mendukung pencapaian prioritas kesatu, yaitu “100.000 Lapangan Kerja Baru”, melalui penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan serta pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Adapun tujuan, sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2021 s.d 2026 serta target capaiannya sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan kontribusi subsektor perikanan pada PDRB		Laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	1,55 %	1,55 %	1,57 %	1,59 %	1,61 %	1,62%	1,63 %
		Berkembangnya sub sektor perikanan	1 Persentase Peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,51 %	1,52 %	1,53 %	1,54 %
			2 Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	0,50 %	0,50 %	0,55 %	0,56 %	0,57 %	0,58 %	0,59 %
			3 Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau	0,50 %	0,50 %	0,51 %	0,52 %	0,53 %	0,54 %	0,55 %



Pengukuran nilai capaian kontribusi subsektor perikanan pada PDRB didasarkan pada data statistik laju pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Perikanan Tangkap adalah kegiatan ekonomi menangkap atau mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Perikanan tangkap diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: Perikanan Tangkap di Laut dan Perikanan Tangkap di Perairan Umum. Sedangkan Perikanan Budidaya adalah kegiatan ekonomi memelihara ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan menggunakan fasilitas buatan. Pada umumnya budidaya perairan dikelilingi galengan atau tanggul (seperti tambak dan kolam), pagar, dll, baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan adalah seluruh hasil (volume) penangkapan dan budidaya ikan yang dilakukan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan. Dalam hal ini produksi perikanan yang dihitung adalah produksi untuk dijual, dimakan sendiri oleh nelayan, maupun diberikan kepada nelayan lain sebagai upah kerja. Akan tetapi, produksi hasil kegiatan yang berupa kegemaran (hobi) tidak dihitung sebagai produksi perikanan.

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan

Pembudidaya Ikan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam kegiatan budidaya ikan / binatang air lainnya / tanaman air. Dalam hal pembudidaya, hanya orang, baik anggota rumah tangga maupun buruh yang secara langsung melakukan pekerjaan pemeliharaan ikan, perbaikan kolam, persediaan air dan pemberian pakan yang dimasukkan sebagai pembudidaya.



Adapun perhitungan terhadap peningkatan produksi perikanan adalah sebagai berikut :

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	$\frac{\text{Jumlah produksi tahun berjalan} - \text{Jumlah produksi tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi tahun lalu}} \times 100 \%$
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	$\frac{\text{Jumlah produksi tahun berjalan} - \text{Jumlah produksi tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi tahun lalu}} \times 100 \%$
Nilai tambah produk olahan hasil perikanan	<p>Nilai tambah = Nilai produk P yang telah di olah - Nilai produk PK segar</p> <p>Ket :</p> <p>Produk P = Produk perikanan dan kelautan</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan adalah selisih nilai produk perikanan dan kelautan yang telah melalui proses pengolahan, dengan produk perikanan dan kelautan segar</p>



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN



Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan, sasaran, dan strategi dari setiap misi, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program

Rumusan strategi menjelaskan cara dan/atau tahapan implementasi, bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan memperhatikan dinamika kondisi internal dan eksternal daerah. Sedangkan arah kebijakan menjelaskan waktu pelaksanaan (Timeline) dari strategi yang telah ditentukan dalam kurun waktu lima



tahun periode Renstra. Rumusan Strategi juga berupa pernyataan perencanaan komprehensif yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian cara-cara dan arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis tersebut secara efektif dan efisien, yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Dalam hal ini strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah berdasarkan target kinerja capaian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik.

Penentuan Arah Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menentukan Tema Pembangunan Tahunan dalam Renja. Oleh karena itu, strategi yang diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat dapat menjelaskan keterkaitan logis kontribusi setiap urusan/program terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk terwujudnya masyarakat Sidoarjo yang lebih sejahtera yang dilakukan melalui optimalisasi potensi basis perikanan, maka upaya - upaya peningkatan produksi perikanan dan produk olahan hasil perikanan merupakan proses pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan pilar ekonomi juga pilar sosial, budaya dan lingkungan sebagai suatu kesatuan agar terjadi keseimbangan.

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam RPJMD tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Dalam Dokumen RPJMD tahun 2021 – 2026 terdapat 5 (lima) strategi umum dan



salah satu yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Strategi 2 yaitu “Penguatan Ekonomi Sektor Strategis Simultan dengan Percepatan Ekonomi Kerakyatan”. Strategi ini terkait kondisi capaian PDRB dimana level sektor dengan kontribusi besar dan kecil tidak dapat diposisikan sendiri-sendiri, namun perlu dikelola secara simultan agar memiliki daya ungkit yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD dan menjadi acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD dengan salah satu sasarannya adalah “Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan”. Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang relevan dengan urusan perikanan adalah Strategi 1.1.2 yaitu “Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna”.

Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari langkah-langkah yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dari Misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 serta Tujuan tingkat OPD yaitu “Meningkatnya kontribusi subsektor perikanan pada PDRB”, dengan sasaran “Berkembangnya subsektor perikanan” Hal ini berarti bahwa strategi dan kebijakan pembangunan daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, serta tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran OPD tersebut, maka strategi yang dilaksanakan Dinas Perikanan kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo

RPJMD KABUPATEN SIDOARJO 2021 - 2026			
VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan			
MISI 2 : Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.			
Sasaran : Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan			
Strategi : Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna			
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kontribusi subsektor perikanan pada PDRB	Berkembangnya subsektor perikanan	1. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien dan lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat nelayan 2. Penjaminan ketersediaan sarana/prasarana usaha perikanan tangkap 3. Fasilitasi sarpras perikanan tangkap 4. Fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan serta kemitraan usaha 5. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil 6. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan



			7. Pengawasan usaha perikanan
		2. Menggalakkan dan mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya2. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan dan penerbitan TDPIK3. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya5. Pembinaan dan Pemantauan pembudidayaan ikan di Darat
		3. Meningkatkan produksi, daya saing, dan kualitas produk hasil perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil2. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan3. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang meliputi :

1. Input(Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output(Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome(Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat



Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo memperhatikan juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 akan melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, guna mewujudkan pencapaian tujuan “Meningkatnya kontribusi subsektor perikanan pada PDRB” dan sasaran “Berkembangnya produktivitas sub sektor perikanan”.

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja, Dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (outpt)	Capaian pd awal periode de 2020	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja
		Kode	Nama Program			2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
Meningkatnya kontribusi subsektor perikanan pada PDRB				Laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan (%)	1,55	1,55		1,57		1,59		1,61		1,62		1,63		
	Berkembangnya subsektor perikanan			1. Persentase Peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah (%)	1,50	1,50		1,50		1,51		1,52		1,53		1,54		
				2. Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	0,50	0,50		0,55		0,56		0,57		0,58		0,59		
		3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap laut (Ton)	15.540	15.800	633.268.782	15.850	696.565.660	15.875	766.255.226	15.880	842.880.749	15.885	927.168.824	15.890	927.168.824	Bidang Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Renstra Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>outpt</i>)	Capaian pd awal periode 2020	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja
		Kode	Nama Program			2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
				Jumlah produksi Perairan Umum Daratan (PUD) ((Ton)	554	560		561		562		563		564		565		
		3.25.05	Program pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase penurunan jumlah pelanggaran di lingkungan perairan. (%)	50	50	56.849.870	50	62.534.857	50	68.788.343	50	75.667.177	50	83.233.895	50	91.557.284	Bidang Perikanan Tangkap
				3. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (%)	0,50	0,50		0,51		0,52		0,53		0,54		0,55		
				4. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (%)	5,0	5,0		3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi Budidaya Air Tawar dan Air Payau (kg/ha/th)	101.524.575	101.525.000	29.106.115.129	101.600.000	32.016.726.642	101.625.000	35.218.399.306	101.630.000	38.740.239.237	101.635.000	42.614.263.160	101.640.000	46.875.689.476	Bidang Produksi Perikanan Budidaya

Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Renstra Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>outpt</i>)	Capaian pd awal periode 2020	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja
		Kode	Nama Program			2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	Tgt	Rp	
				sertifikat jaminan mutu														
	Terselenggaranya pelayanan kesekretariatan yg memuaskan			Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan														
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan		1 Tahun 9.9174 04.694	1 Tahun 10.909 .145.163	1 Tahun 12.000.0 59.679	1 Tahun 13.200 .065.647	1 Tahun 14.520 .072.212	1 Tahun 14.520 .072.212	1 Tahun 14.520 .072.212	1 Tahun 14.520 .072.212	1 Tahun 14.520 .072.212	1 Tahun 14.520 .072.212	1 Tahun 14.520 .072.212	1 Tahun 14.520 .072.212	Sekretariat

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo



Pada masing-masing kegiatan tersebut mencakup beberapa subkegiatan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Maju, Aman dan Sejahtera, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026. Terkait dengan hal tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo akan mendukung pencapaian Program Strategis No 1 yaitu “ 100.000 Lapangan Kerja Baru “ melalui pelaksanaan 3 program yaitu :

- ~ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
- ~ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
- ~ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo secara riil.

Diantara misi RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah “Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan”, yang salah satu tujuannya adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan”

Berdasarkan tujuan RPJMD tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo menetapkan Tujuan dalam Renstra 2021 -2026 adalah “Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah” dengan Sasaran “Berkembangnya subsektor perikanan”



Secara rinci mengacu pada RPJMD, penetapan indikator kinerja program Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	1,55	1,55	1,57	1,59	1,61	1,62	1,63	1,63
2	Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	1,50	1,50	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,54
3	Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	0,50	0,50	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,59
4	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,55
5	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya air air tawar	5,00	5,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,50
6	Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan krupuk udang (Rp/Kg)	60.500	60.500	60.000	61.000	62.000	63000	64.000	64.000
7	Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan Bandeng Asap (Rp/Kg)	127.500	127.500	127.000	127.500	127.600	127.700	127.800	127.800



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Sebagaimana diuraikan pada BAB terdahulu bahwa Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, aspek perimbangan kewenangan pusat dan daerah terutama dalam era otonomi pembangunan, dan aspek perencanaan strategis, dikemukakan pula visi, misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD dan selanjutnya dirumuskan kedalam prioritas kebijakan pembangunan, serta melalui penetapan tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, dan program pembangunan

Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang pekerjaan umum khususnya subbidang perikanan dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

Pelaksanaan pembangunan di subbidang perikanan yang akan berlangsung lima tahun kedepan, bukan saja diharapkan mampu memberikan kontribusi pada capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, tapi juga harus dapat mendukung kegiatan



perekonomian rakyat yang makin berdaya, melalui peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi sekaligus juga mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan.

Dalam penyusunan rencana pembangunan maupun efektivitas pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan tiga pilar Good Governance, yaitu; Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders. Tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan maupun stakeholders guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparaturnya Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten guna mendukung terwujudnya good governance.

Sidoarjo, September 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sidoarjo

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM
NIP. 19661228 199208 1 002.

===== oo000oo =====

								Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Jumlah cetak dan penggantian yang tersedia	1 tahun	7,701,953	1 tahun	8,472,148	1 tahun	9,319,363	1 tahun	10,251,299	1 tahun	11,276,429	1 tahun	11,276,429	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku bacaan, peraturan perundang-undangan	1 tahun	5,791,896	1 tahun	6,371,086	1 tahun	7,008,194	1 tahun	7,709,014	1 tahun	8,479,915	1 tahun	8,479,915	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Penyediaan bahan/ material yang tersedia	Jumlah bahan/ material yang tersedia	1 tahun	7,040,000	1 tahun	7,744,000	1 tahun	8,518,400	1 tahun	9,370,240	1 tahun	10,307,264	1 tahun	10,307,264	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Facilitasi kunjungan tamu	Jumlah jaman rapat/ tamu yang difasilitasi	1 tahun	4,287,702	1 tahun	4,716,472	1 tahun	5,188,120	1 tahun	5,706,931	1 tahun	6,277,625	1 tahun	6,277,625	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	1 tahun	235,009,426	1 tahun	258,510,369	1 tahun	284,361,406	1 tahun	312,797,566	1 tahun	344,077,301	1 tahun	344,077,301	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
									Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
								Pejabat/arsip dinamis SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	1 tahun	4,070,000	1 tahun	4,477,000	1 tahun	4,924,700	1 tahun	5,417,170	1 tahun	5,958,887	1 tahun	5,958,887	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
							Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	1 tahun	911,370,052	1 tahun	1,002,507,057	1 tahun	1,102,757,763	1 tahun	1,213,033,539	1 tahun	134,336,893	1 tahun	134,336,893	1 tahun	134,336,893	Sekretaris	
								Penyediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 tahun	618,137,363	1 tahun	680,171,099	1 tahun	748,188,209	1 tahun	823,007,029	1 tahun	905,307,732	1 tahun	905,307,732	1 tahun	905,307,732	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
								Penyediaan peralatan/ mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor/ rumah dinas/ jabatan yang diadakan	1 tahun	279,507,309	1 tahun	307,458,040	1 tahun	338,203,844	1 tahun	372,024,229	1 tahun	409,226,652	1 tahun	409,226,652	1 tahun	409,226,652	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	1 tahun	13,525,380	1 tahun	14,877,918	1 tahun	16,365,710	1 tahun	18,002,281	1 tahun	19,802,509	1 tahun	19,802,509	1 tahun	19,802,509	Sekretaris	
								Penyediaan alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	Jumlah angkutan darat tak bermotor yang diadakan	1 tahun	13,525,380	1 tahun	14,877,918	1 tahun	16,365,710	1 tahun	18,002,281	1 tahun	19,802,509	1 tahun	19,802,509	1 tahun	19,802,509	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Perseentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	1 tahun	936,009,492	1 tahun	1,029,610,641	1 tahun	1,132,571,485	1 tahun	1,245,828,634	1 tahun	1,370,411,497	1 tahun	1,370,411,497	1 tahun	1,370,411,497	Sekretaris	
								Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rekening listrik, telepon dan internet yang terbayar	1 tahun	245,755,092	1 tahun	270,330,601	1 tahun	297,363,661	1 tahun	327,100,027	1 tahun	359,810,030	1 tahun	359,810,030	1 tahun	359,810,030	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
								Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	1 tahun	690,254,400	1 tahun	759,279,840	1 tahun	835,207,824	1 tahun	918,728,606	1 tahun	1,010,601,467	1 tahun	1,010,601,467	1 tahun	1,010,601,467	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
									Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
									Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
									Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 tahun	1,479,044,570	1 tahun	162,695,027	1 tahun	178,964,530	1 tahun	196,860,983	1 tahun	216,547,081	1 tahun	216,547,081	1 tahun	216,547,081	Sekretaris	
								Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan pertinisan kendaraan dinas operasional / lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	1 tahun	51,361,750	1 tahun	56,497,925	1 tahun	62,147,718	1 tahun	68,362,489	1 tahun	75,198,748	1 tahun	75,198,748	1 tahun	75,198,748	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
									Jumlah bahan peralatan dan bahan pemeliharaan kendaraan yang tersedia	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
									Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 tahun	13,200,000	1 tahun	14,520,000	1 tahun	15,972,000	1 tahun	17,569,200	1 tahun	19,326,120	1 tahun	19,326,120	1 tahun	19,326,120	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 tahun	65,340,000	1 tahun	71,874,000	1 tahun	79,061,400	1 tahun	86,967,540	1 tahun	95,664,294	1 tahun	95,664,294	1 tahun	95,664,294	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perseentase ASN yang disiplin	1 tahun	6,781,853,835	1 tahun	7,460,039,218	1 tahun	8,206,043,140	1 tahun	9,026,647,454	1 tahun	9,929,312,200	1 tahun	9,929,312,200	1 tahun	9,929,312,200	Sekretaris	
									Perseentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	1 tahun	23,520,740	1 tahun	25,872,814	1 tahun	28,460,096	1 tahun	31,306,105	1 tahun	34,436,716	1 tahun	34,436,716	1 tahun	34,436,716	
								Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perseentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	1 tahun	12,499,982	1 tahun	13,749,980	1 tahun	15,124,978	1 tahun	15,124,988	1 tahun	16,637,487	1 tahun	16,637,487	1 tahun	16,637,487	Sekretaris	
									Perseentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun			10,731,827	
							Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan R/BMD yang disusun	1 tahun	7,329,982	1 tahun	8,062,980	1 tahun	8,869,278	1 tahun	9,756,206	1 tahun	10,731,827	1 tahun	10,731,827	1 tahun	10,731,827	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
							Penyusunan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	1 tahun	5,170,000	1 tahun	5,687,000	1 tahun	6,255,700	1 tahun	6,881,270	1 tahun	7,569,397	1 tahun	7,569,397	1 tahun	7,569,397	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	